

## **BAB II**

### **KONDISI KEMISKINAN PEREMPUAN DAN AWAL MULA PROGRAM MAMPU DI INDONESIA**

Bab ini akan menguraikan secara rinci Program MAMPU, sebagai kolaborasi antara pemerintah Australia dan Indonesia, yaitu DFAT dan BAPPENAS dengan meningkatkan akses perempuan Indonesia yang kurang beruntung ke layanan utama dan program pemerintah, serta mendukung tujuan SDGs nomor 1,3,5,8. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, program MAMPU memiliki mitra-mitra untuk memenuhi tujuan tersebut. Dengan bantuan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh mitra MAMPU, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif, dapat menjangkau audiens baru, dan memengaruhi pembuat kebijakan.

#### **2.1 Kemiskinan pada Perempuan di Indonesia**

Gender dan kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang sering terjadi. Gender dianggap sebagai penyebab utama yang menghasilkan penderitaan dengan kekurangan perempuan, sebagai konstruksi sosial yang mewujudkan kedudukan dan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan di rumah. Tindakan diskriminasi pada perempuan adalah hal yang dapat kita ketahui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan supaya perempuan bisa mendapatkan memperjuangkan hak-

haknya yang tidak diperbolehkan (Sudiarti et al., 2000). Banyak orang percaya bahwa perempuan lebih miskin daripada laki-laki, oleh karena itu perhatian khusus diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penanggulangan kemiskinan memprioritaskan perempuan dan mengurangi kesenjangan gender.

Meskipun pendapat bahwa para perempuan lebih miskin dari para laki-laki sering muncul, dikarenakan hal ini terjadi bersamaan dengan kemajuan yang dicapai dalam memahami kemiskinan dari berbagai perspektif, termasuk keterbatasan akses dan kemampuan serta peluang pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang (Noerdin et al., 2006). Peluang upah, pembagian kerja, distribusi pendapatan, pencapaian pendidikan, dan akses ke layanan publik semuanya dipengaruhi oleh hubungan gender di setiap negara. Sebagian besar perempuan, menghabiskan lebih sedikit waktu, menghasilkan lebih sedikit uang, kurang mementingkan pendidikan, dan memiliki lebih sedikit akses ke keuangan dan informasi daripada pria (Nadim & Nurlukman, 2017). Dunia dan sistem perdagangan global berdampak pada kemiskinan perempuan melalui keputusan investasi dan industrialisasi, keduanya tersebut telah mempengaruhi pasar tenaga kerja (Cagatay, 2001).

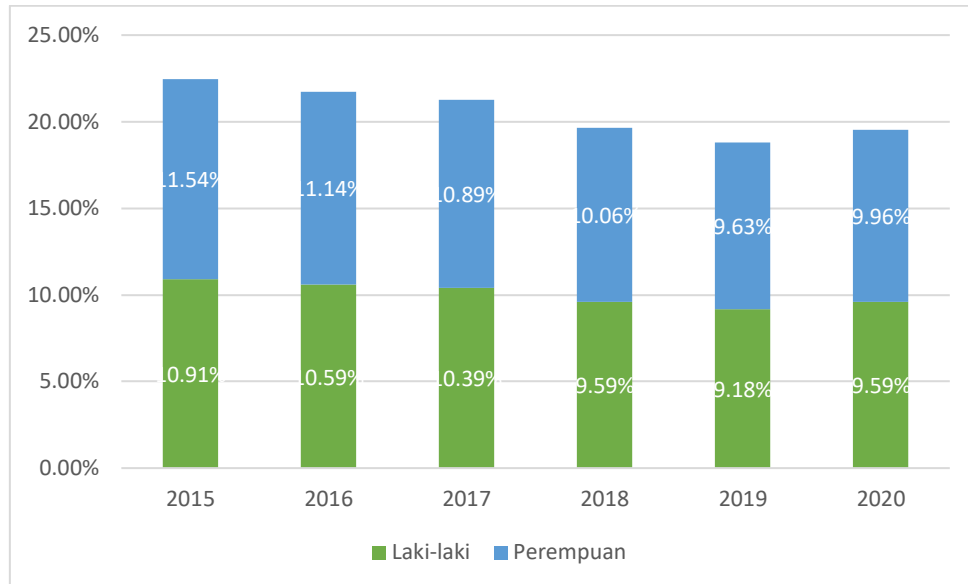
Pandangan kedua lawan jenis tentang penyebab kemiskinan juga sangat berbeda. Perempuan dikategorikan banyak alasan yang menimbulkan kemiskinan ke dalam enam kategori (khususnya ketidakberdayaan, isolasi, miskin materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap/perilaku). Perempuan lebih cenderung menyebutkan masalah yang dapat digolongkan sebagai ketidakberdayaan dan perilaku dibandingkan laki-laki, dan mereka juga lebih

cenderung menyebutkan masalah yang berhubungan dengan kelemahan fisik dibandingkan laki-laki, terutama yang berhubungan dengan status gizi keluarga. Di sisi lain, laki-laki lebih mungkin dibandingkan perempuan untuk mengangkat isu-isu isolasi fisik dan non-fisik secara konsisten (Asriani & Osira, 2019).

Studi tersebut memperlihatkan bahwa pandangan antara laki-laki dan perempuan ini berbeda tentang sebab dan akibat kemiskinan terkait dengan posisi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di rumah dan di masyarakat. Perempuan lebih bertanggung jawab untuk mengurus urusan keluarga, dan akibatnya, mereka cenderung menjadi sasaran elemen ketidakberdayaan rumah. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suami yang menganggur dan tidak mampu menghidupi keluarga, mahalnya barang-barang konsumsi, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta masalah utang yang terus mengganggu kualitas hidup mereka.

Masalah tersebut dapat dikatakan masih menjadi isu yang ramai terhadap di Indonesia. Menurut penelitian yang berjudul “Perempuan dan Kemiskinan”, dikatakan bahwa rumah tangga adalah salah satu faktor adanya diskriminasi dan subordinasi pada perempuan dalam kesetaraan gender dan kemiskinan. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya rumah tangga memperlihatkan bahwa perempuan dengan laki-laki mempunyai tipe kemiskinan yang beda. Kemiskinan perempuan yang ada di dalam ruang publik selalu dihubungkan dengan ruang tertutup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan (Indraswari, 2009).

**Tabel 2. 1 Persentase Masyarakat yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Gender**



Sumber: Website Resmi Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/indicator/23/1538/1/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin.html>

Pada tabel 2.1 berikut adalah untuk menunjukkan data persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut gender. Bagian yang berwarna hijau menunjukkan data kemiskinan dari laki-laki, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan data kemiskinan dari perempuan. Dalam grafik dapat kita lihat bahwa terdapatnya ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam data terjadi penurunan, namun penurunan yang terjadi belum signifikan dan dapat dikatakan lambat.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) pemerintah Indonesia mengartikan kemiskinan dari perspektif pemenuhan hak-hak dasar, yaitu “keadaan seseorang atau sekelompok orang (laki-laki dan perempuan) yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi dengan baik untuk mengejar dan

*mengembangkan kehidupan yang bermartabat.*” Diagnosa kemiskinan yang luas adalah ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar, yang meliputi (Royat, 2008):

1. Pasokan pangan yang tidak mencukupi dan kualitas pangan yang buruk.
2. Akses yang tidak memadai dan kualitas perawatan kesehatan dan pendidikan yang buruk.
3. Layanan pendidikan sulit diperoleh dan berkualitas rendah.
4. Sedikitnya pilihan pekerjaan dan bisnis yang tersedia.
5. Akses terbatas ke pilihan perumahan yang terjangkau.
6. Kurangnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang bersih/aman.
7. Belum adanya kepastian tentang kepemilikan dan penguasaan tanah.
8. Depresiasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Langkah keamanan tidak dilindungi atau dijamin secara memadai.
10. Partisipasi masyarakat miskin terbatas karena kurangnya akses.

Pentingnya masalah ini untuk para perempuan adalah ketidaksetaraan gender ini telah meningkatkan kemiskinan pada perempuan, dan begitu juga sebaliknya, kemiskinan itu sendiri memperburuk ketidaksetaraan gender. Wacana tentang kemiskinan tersebut tidak dapat menghilangkan masalah perbedaan oleh laki-laki dan perempuan miskin, karena kaum perempuan tersebut mereka miskin atau tidak miskin, mereka wajib pergi dengan bekal, yaitu pendidikan, ekonomi akses, dan lain-lain, berbeda dari laki-laki (Klungman et al., 2014).

Dalam kasus-kasus tersebut telah membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia untuk lebih memikirkan hal dalam cara untuk kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Pada ruang internasional, institusi RI ini telah kerja sama bersama melalui CSW (*The Commission on the Status of Women*). CSW tersebut adalah lembaga yang dibawahahi oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). CSW sendiri merupakan kepala badan antar-pemerintah global yang khususnya berkontribusi untuk memperkenalkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW mempunyai peran yang penting dalam hal menawarkan hak-hak perempuan, dan membuat standar global atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU, 2018).

Indonesia sendiri telah membentuk kerja sama bersama dengan Australia karena menurut kedua negara ini kesetaraan gender ini adalah salah satu termasuk poin penting yang ingin diraih dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kelima yaitu *gender equality*. Untuk kepentingan terhadap peningkatan akses terhadap perempuan terhadap pemerintah, Australia dan Indonesia membuat program untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu, MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) (Sindo News, 2019).

### **2.1.1 Kemiskinan Perempuan di Indonesia yang menjadi latar belakang terbentuknya Program MAMPU**

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting di Indonesia. Sedangkan dengan total penduduk yang banyak dan besar, Indonesia dapat dikatakan tidak bisa menghindari kesulitan-kesulitan tersebut. Kemiskinan merupakan tantangan yang sering dihadapi perempuan. Karena perempuan Indonesia masih merupakan demografis yang rentan dalam hal kemiskinan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam keadaan ini. Isu-isu perempuan termasuk kurangnya keterlibatan dalam angkatan kerja, partisipasi politik, dan pencapaian pendidikan relatif terhadap laki-laki.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dari tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan penduduk suatu daerah digunakan sebagai ukuran agregat untuk menentukan tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Perubahan tingkat kemiskinan sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan yang dinilai. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 meratifikasi konvensi CEDAW, salah satu konvensi perempuan. Keterbelakangan perempuan dapat terlihat dalam pembagian kerja yang berdasarkan gender, yang meletakkan perempuan di rumah dan laki-laki di tempat kerja.

Karena penguraian kerja secara seksual ini dapat mengkategorikan perempuan pada posisi subordinat atau terpinggirkan dari laki-laki, maka keinginan untuk mewujudkan perempuan sebagai peserta yang setara baik

dalam rumah tangga atau dalam masyarakat dapat dicapai melalui sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan agar tidak meminggirkan perempuan (UN Women). Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tidak didasarkan pada konvensi ini.

Kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. MAMPU merupakan proyek kerja sama BAPPENAS dan DFAT untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Untuk membantu mengupayakan hak-hak perempuan miskin, program tersebut dimulai pada tahun 2012 dan diresmikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia. BAPPENAS mewakili Indonesia, dan DFAT bertanggung jawab untuk mewakili Australia.

Dengan menurunkan dan meningkatkan ketahanan rumah tangga dalam melewati bencana yang tidak disengaja, seperti penyakit atau kecelakaan, perlindungan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat miskin agar tidak semakin terjerumus ke dalamnya. 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dicapai melalui langkah-langkah perlindungan sosial yang tepat (TPB atau SDGs). Untuk menjaga kesejahteraan penduduknya, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014. Selama pelaksanaan program, banyak perempuan yang terutama bekerja di sektor informal dan mereka yang tinggal di lokasi yang jauh, belum bisa memanfaatkannya. Khususnya pelayanan kesehatan



reproduksi. Karena kurangnya bukti, mereka tidak dapat terlibat dalam kriteria, layanan, atau program yang bermanfaat.

## **2.2 Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Indonesia**

Status dan peran sosial seseorang harus dibedakan dari faktor-faktor lain. Status sosial ekonomi merupakan indikator statistik kedudukan seseorang dalam berbagai kelompok sosial dan organisasi masyarakat. Lebih tepatnya, istilah “peran” menggambarkan posisi seseorang dalam masyarakat dan peran yang dimainkannya, bukan orang tertentu (Soekanto & Soerjono, 2002).

Perempuan sangat penting dalam pengembangan kehidupan keluarga yang baik, memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara negatif oleh perubahan dan bahwa mereka mencapai kondisi yang sehat, dan bahagia, sehingga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Kapasitas dan potensi perempuan pada perannya sebagai pasangan dan ibu rumah tangga adalah faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan (pendukung utama keberhasilan) sebuah rumah tangga (terutama untuk masa depan anak) (Asriani & Osira, 2019). Maka dari itu, upaya peningkatan keterampilan dan potensi perempuan harus dikembangkan dan dilaksanakan agar perempuan mampu bekerja secara optimal di sektor domestik secara profesional. Meskipun ada banyak definisi dan makna yang berbeda tentang wanita, masing-masing dari makna dan definisi ini mengarah pada kesimpulan yang sama: wanita adalah sosok yang sangat kuat, terlepas dari kekurangan apa pun yang mungkin mereka miliki.

Dalam hal persamaan hak, perempuan masih sering diperlakukan sebagai kelompok kelas dua (subordinat) bahkan di zaman emansipasi seperti kita sekarang. Kemampuan perempuan di tempat kerja terbatas pada urusan rumah tangga. Wanita mulai bangkit dan membuat diri mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dari waktu ke waktu. Karena sumbangsih mereka bagi pertumbuhan negara, kecerdasan dan keahlian perempuan Indonesia tidak lagi bisa diremehkan.

Dapat disimpulkan peran perempuan di Indonesia tersebut telah menjadi hal yang penting, bahwa perempuan masih dapat dikatakan belum mendapatkan hak bebas sepenuhnya seperti yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Perempuan masih dianggap sebagai kelompok kelas kedua, yang seharusnya peran perempuan di Indonesia ini dapat disetarakan oleh peran laki-laki juga.

### **1.3 Indonesia dan Australia dalam meningkatkan partisipasi perempuan khususnya dalam Program MAMPU**

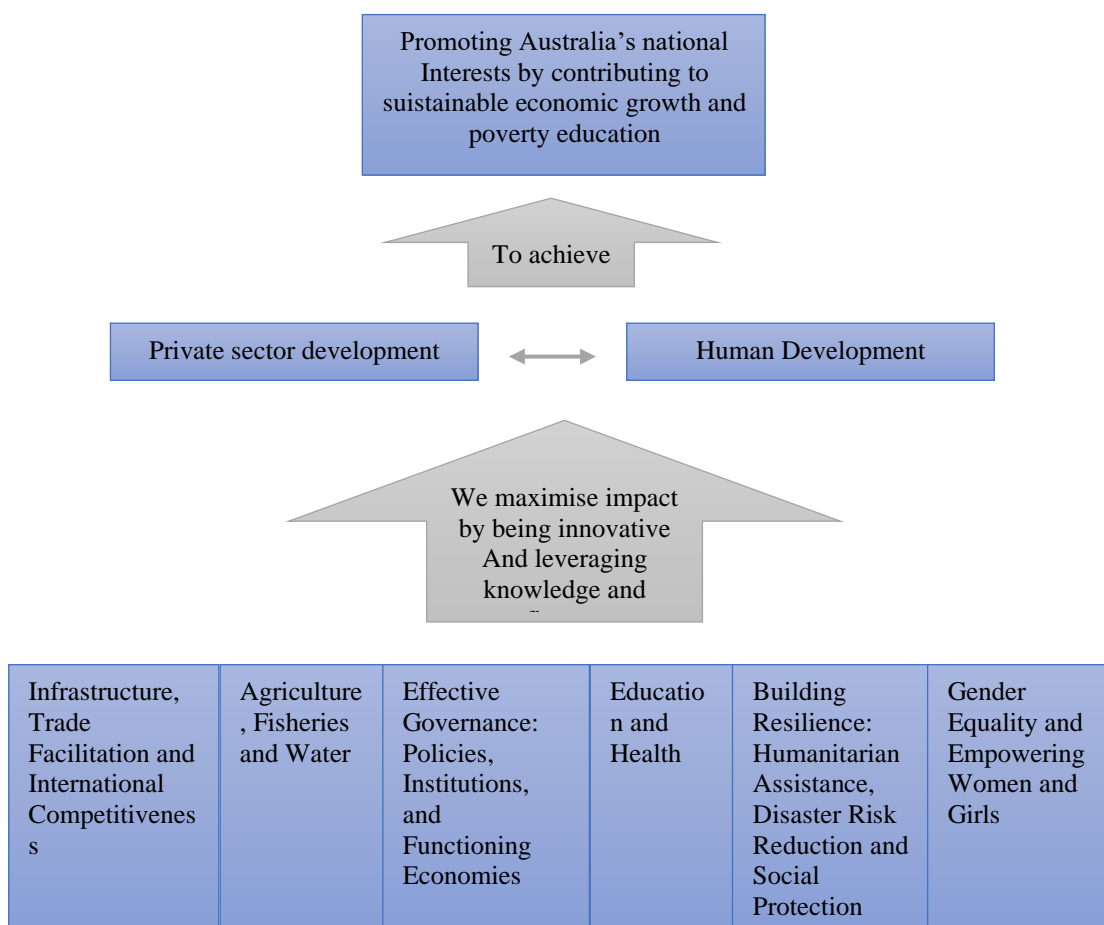
Terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Australia, salah satunya adalah bantuan luar negeri non-militer, seperti yang diberikan oleh badan AUSAID (*Australia Agency for International Development*), membantu mengentaskan kemiskinan sekaligus menjaga skala ekonomi. Sebagai lembaga pendukung dalam Program MAMPU, AUSAID memberikan dana hibah, pendidikan, kesehatan, korupsi, keamanan, dan layanan politik adalah di antara banyak bidang di mana AUSAID berusaha memberikan dampak positif.

AUSAID adalah donor utama untuk Program MAMPU, mereka memberikan sejumlah dana melalui mitra-mitra CSO Program MAMPU dan

Pemerintah Indonesia. Dana ini bukan merupakan pinjaman, akan tetapi dana ini merupakan hibah yang akan dikelola untuk Program MAMPU. *United Nations, Australian Red Cross* dan *World Vision* bekerja sama dengan AUSAID untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara terkoordinasi.

**Gambar 2.1 Skema Strategi Kerangka Kerja Aid Program**

*The Strategic Framework for The Aid Program*



Sumber: Website Resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (online)  
<https://www.dfat.gov.au/development/australias-development-program>

AUSAID menawarkan bantuan dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi untuk melayani kepentingan nasional Australia. Bagi AUSAID, dukungan sektor swasta dan sumber daya alam adalah tujuan utamanya.

Untuk bersaing secara global, kerangka strategis pada gambar 2.1 menyoroti investasi Australia di enam sektor, termasuk fasilitas dan infrastruktur perdagangan, akses air merupakan perhatian utama bagi pertanian, perikanan, dan akuakultur, kemampuan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi dan operasi kelembagaan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang baik bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal di negara ini. Salah satu masalah paling penting yang dihadapi dunia saat ini adalah bagaimana menjaga orang agar tetap aman dari bencana alam dan perang. Terakhir, tentang gender dan pemberdayaan perempuan.

Program MAMPU AUSAID fokus terhadap gender dan pemberdayaan perempuan dengan cara yang penting. Disparitas ekonomi antara laki-laki dan perempuan mungkin berdampak pada keamanan dan regulasi negara. Orang miskin di negara berkembang juga berdampak pada pertumbuhan negara. AUSAID memperkirakan bahwa perempuan dalam posisi yang sama dibayar antara 10% dan 30% lebih rendah dari rekan laki-laki mereka. Upah perempuan dan laki-laki naik 76% karena jumlah orang yang bekerja meningkat. Perempuan membentuk hanya 6% dari legislator di negara-negara Kepulauan Pasifik, dibandingkan dengan rata-rata global 23,3% (AusAid, 2012).

**Gambar 2.2 Skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**



Sumber: Website Resmi Bappenas – SDGs

<https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>

SDGs adalah perpanjangan dari *Millennium Development Goals* (MDGs), yang digantikannya (2000-2015). Untuk mencapai masa depan yang damai dan sejahtera, negara-negara harus bekerja sama untuk mencapai 17 SDGs dan 169 target mendesaknya yang ada pada dalam gambar 2.2 (SDGs UN, n.d.). Sebagai pelengkap, agenda yang belum tercapai dalam MDGs akan dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs. Peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup generasi mendatang diharapkan dapat dicapai melalui SDGs (SDGs Bappenas, n.d.)

Agenda global tersebut diangkat oleh semua negara anggota, yang termasuk negara Australia dan Indonesia, pada Sidang Umum PBB pada September 2015. Indonesia dan Australia, di sisi lain, menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian SDGs. Australia lebih mudah mencapai SDGs karena merupakan

negara maju. Misalnya, Australia secara konsisten menempati peringkat 40 negara teratas dalam Indeks SDGs 2016-2019, sementara Indonesia hanya menempati peringkat 105 negara teratas selama periode waktu yang sama.

Partisipasi dalam SDGs merupakan komitmen yang dibuat oleh Australia yang merupakan negara maju (Australian Government, 2016). Berinvestasi dalam pembangunan negara lain dapat membantu memangkas dampak negatif terhadap keamanan Australia di dunia yang semakin saling bergantung. 8 Dari 17 tujuan, Australia telah berpartisipasi dalam menawarkan tujuan yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Khususnya Program MAMPU ada di SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 5 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Selain SDGs, juga ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

## **2.4 Program MAMPU**

Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS) dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) melaksanakan Program MAMPU Tahap I yang diluncurkan pada April 2013 di bawah perjanjian anak perusahaan yang ditandatangani pada tahun 2013. Perempuan miskin dan kelompok yang mengkampanyekan hak adalah fokus dari perjanjian ini. Penandatanganan kesepakatan antara Australia dan Indonesia pada 25 Januari 2017 untuk melaksanakan Program MAMPU Tahap II (Juli 2016-Desember 2020) dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan Indonesia

dalam administrasi dasar dan program pemerintah lainnya dalam rangka untuk mendapatkan kesepakatan gender di Pemerintah. Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia dan kesetaraan gender di Australia ditunjukkan oleh pemerintah Australia dalam komunikasinya dengan organisasi pemberdayaan perempuan Indonesia.

#### **2.4.1 Awal Mula Program MAMPU**

Pemberdayaan perempuan melalui penggunaan sumber daya sangat penting dalam proyek pengentasan kemiskinan. Kurangnya akses terhadap sumber daya dan kemampuan perempuan untuk melakukan kontrol atas sumber daya tersebut merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi kemiskinan (Hastuti & Dyah, 2008).

Sebagai bagian dari inisiatif MAMPU, yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan dan meningkatkan akses mereka ke program pengentasan kemiskinan dan memastikan jaminan sosial, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *SDGs*. Dengan kepemimpinan dan akses yang lebih baik pada program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi perempuan, peran perempuan di negara ini dapat membantu secara berkelanjutan mengurangi kemiskinan bagi *SDGs*.

perempuan yang mempunyai posisi rentan dan sering menjadi korban kemiskinan. Akibatnya, perempuan memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan dalam skenario ini. Upaya pengentasan kemiskinan pada perempuan juga dapat dilakukan, salah satunya dengan strategi pemberdayaan.

Mengembangkan perekonomian suatu negara melalui pemberdayaan perempuan merupakan peluang yang sangat besar (MAMPU, 2018).

Menjelang akhir tahun 2012, Australia dan Indonesia mulai bekerja sama untuk memerangi kemiskinan berlandas gender. Dalam sebuah ungkapan, Duta Besar Australia Indonesia yaitu, Greg Moriarty, mencatat bahwa strategi bantuan Australia memprioritaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Beliau berkata *“Menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, Australia berkomitmen untuk mendukung dan bermitra dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan”* (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2014).

Maka dari itu, Australia dan Indonesia bekerja sama dalam **Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)**. Dalam kerja sama tersebut Australia membantu pemerintah Indonesia mengatasi dan membantu pengentasan kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi dan menjangkau perempuan miskin melalui program dan layanan publik (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2013).

#### **2.4.2 Profil dan Tema Program MAMPU**

Program MAMPU ini bertujuan dalam peningkatan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang berguna untuk mengembangkan akses bagi para perempuan miskin di Indonesia untuk mendapatkan layanan penting dan program pemerintah, dan membantu menciptakan tujuan pembangunan



berkelanjutan. Program ini memiliki hubungan dengan **lima area tematik**, **pertama** adalah peningkatan akses perlindungan sosial. **Kedua**, perbaikan kondisi kerja. **Ketiga**, perlindungan buruh migran. **Keempat**, peningkatan kesehatan dan gizi perempuan. **Kelima**, pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pemberdayaan, kehidupan perempuan dapat berkembang dari kondisi kekuasaan dan akses terbatas ke kondisi di mana kekuasaan dan agensinya lebih ditingkatkan daripada sebelum dia dipekerjakan untuk mengelola program MAMPU. Perempuan dapat memperoleh akses ke lima aset di tingkat individu sebagai hasil dari proses pemberdayaan. Di antara aset-aset ini adalah perubahan dalam keterampilan, pengetahuan, dan harga diri seseorang. Selain uang dan sumber daya lainnya, MAMPU juga memberikan akses kepada perempuan kurang mampu ke berbagai aset lain, seperti modal manusia dan bantuan sosial.

Atas permintaan Program MAMPU, diberikan bantuan tunai dan teknis kepada 13 mitra penting yang dipilih melalui proses yang kompetitif. Mereka bekerja sama dengan jaringan 100 kelompok lokal yang beroperasi di 944 desa di 154 kabupaten/kota di 27 provinsi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan MAMPU. Operasi MAMPU dilaksanakan di 27 provinsi di Indonesia oleh jaringan 100 organisasi lokal yang ada. Misalnya, kelompok perempuan lokal dan pengorganisasian masyarakat, komite yang dibentuk untuk menyatukan layanan tertentu, kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, program pendidikan keaksaraan orang dewasa, advokasi atas nama pemerintah

daerah atau lokal melalui forum multi-stakeholder dengan media, pendampingan. Dan pelatihan pemimpin perempuan merupakan bagian dari upaya Program MAMPU untuk memberdayakan perempuan (Damayanti, 2019).

Untuk mencapai tujuannya dalam lima area tematik, MAMPU bertumpu terhadap keyakinan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah tujuan dan cara untuk mencapainya. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengekspresikan preferensi dan pengaruh mereka, akses yang lebih besar ke layanan akan dicapai sebagai hasil dari menempatkan mereka di pusat pembangunan dan upayanya. MAMPU Indonesia mengakui dan mendukung inisiatif dalam program yang membantu menciptakan kesempatan penting untuk perubahan transformatif, yang memiliki tujuan utama dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Inisiatif baru oleh Program MAMPU ini bermaksud untuk membantu gerakan perempuan secara keseluruhan, serta kelompok-kelompok di kawasan dan di seluruh dunia, membangun jaringan yang lebih kuat dan mengatasi kebutuhan lokal dan global yang mendesak. MAMPU juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi mitra dan sub-mitra MAMPU dengan membina sinergi dan meningkatkan keterampilan antar organisasi mitra dan sub-mitra MAMPU dalam rangka pemberdayaan perempuan lokal. Dengan adanya gagasan lembaga yang bekerja sama dengan MAMPU sebagai bagian dari pemerintah Indonesia yang dilindungi oleh mitranya, hal ini sesuai dengan konsep kemitraan. Oleh karena itu, pemerintah dan yang melaksanakan program

harus menjalin kemitraan dengan mitra yang harus sesuai dengan tiga prinsip kemitraan, yaitu transparansi, saling menguntungkan, dan akuntabilitas.

Maka dari itu, perempuan diperkirakan akan berperan aktif dalam pengambilan keputusan komunal dan akan melaksanakan perbaikan secara progresif. Bidang MAMPU lainnya bersifat lintas sektoral, namun tidak terkait langsung dengan tema utama, dan memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan isu-isu perempuan. Termasuk di dalamnya adalah isu-isu seperti pernikahan anak dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta partisipasi perempuan dalam proses legislatif dan koalisi MAMPU. Penting agar MAMPU dan mitranya sebagai staf yang melaksanakan untuk memiliki kompetensi yang berkualitas sesuai dengan peran yang dibutuhkan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui lima bidang tematik, sehingga struktur organisasinya jelas terimplementasi di mana MAMPU dan mitranya sebagai yang melaksanakan untuk memiliki kompetensi yang berkualitas.

**Tabel 2. 2 Kategori Mitra dengan Area Tematik Program MAMPU**

NO	Mitra Program MAMPU	Area Tematik Program MAMPU
1.	PEKKA, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia	Meningkatkan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial
2.	TURC ( <i>Trade Union Rights Centre</i> ), Bitra Indonesia, Yayasan Annisa Swasti	Meningkatkan Kondisi Pekerjaan dan Menghapuskan Diskriminasi di Tempat Kerja

3.	Migrant Care	Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri
4.	Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan, PERMAMPU	Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan
5.	Forum Pengada Layanan, KOMNAS Perempuan, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)	Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan

Sumber: Website Resmi Program MAMPU – BAPPENAS  
<http://mampu.bappenas.go.id/>

Dalam mitra-mitra tersebut mereka mempunyai prinsip kemitraan yang sama yaitu kesetaraan dan keseimbangan, serta saling menguntungkan. Dalam tabel 2.2 telah dijelaskan berbagai mitra yang bekerja di area yang berbeda-beda. Program kemitraan MAMPU disponsori oleh DFAT Australia dan BAPPENAS Indonesia serta organisasi-organisasi yang berfokus pada perempuan atas dasar kemitraan. Sesuai dengan tiga prinsip kemitraan, MAMPU harus menerapkan informasi dan transparansi dalam mengelola dana agar dapat menjalin hubungan yang baik dan saling terkait dengan mitra lainnya. Sejumlah pemain atau mitra terlibat dalam pelaksanaan program, masing-masing dengan peran khusus.

Adapun tujuan-tujuan dari mitra-mitra tersebut:

1. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA): Didirikan tahun 2000, PEKKA berfokus pada kepala rumah tangga harus diberikan sumber daya dan alat yang mereka perlukan untuk memastikan dan

meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga mereka, serta berpartisipasi dalam kegiatan dan proyek yang bertanggung jawab secara sosial. Ada 20 provinsi, 34 kabupaten dan 129 desa/kelurahan peserta Program MAMPU (MAMPU, n.d.-r)

2. Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan: Didirikan tahun 2000, Sebuah masyarakat tanpa kekerasan terhadap perempuan dan alokasi kekuasaan yang adil berdasarkan gender harus menjadi tujuan utama organisasi perempuan. Dalam Program MAMPU, mitra KAPAL Perempuan aktif di 6 provinsi, 15 kabupaten, 25 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-a).
3. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI): Didirikan tahun 1998, berfokus pada membela perempuan miskin dan terbatas untuk keadilan dan kesetaraan dalam Indonesia yang demokratis. Dalam Program MAMPU, KPI aktif di 8 provinsi, 30 kabupaten, 78 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-b).
4. *Trade Union Rights Centre* (TURC): Didirikan tahun 2003, perwakilan pekerja dan menciptakan kapasitas untuk berorganisasi, untuk mengupayakan reformasi peraturan tenaga kerja di daerah maupun nasional. Dalam Program MAMPU, TURC aktif di 4 provinsi, 7 kabupaten, 33 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-c).
5. Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA): Didirikan tahun 1986, berfokus pada memajukan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dalam diskusi kebijakan, aliansi strategis, pendidikan, pelatihan. Dalam

Program MAMPU, BITRA aktif di 4 kabupaten dan 30 desa/kelurahan di Sumatra Utara (MAMPU, n.d.-o)

6. Yayasan Annisa Swasti (Yasanti): Didirikan tahun 1982, berfokus pada pemberdayaan perempuan, terkhusus perempuan pekerja, melalui pengorganisasian komunitas, pendidikan, advokasi, dan mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Dalam Program MAMPU, Yasanti aktif di 2 provinsi (DIY dan Jawa Tengah), 4 kabupaten, 30 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-n)
7. Migrant (*Counseling, Advocacy, Research, and Education*) CARE: Didirikan tahun 2004, fokus pada peningkatan perlindungan dan layanan yang diberikan oleh otoritas pemerintah untuk melindungi pekerja migran perempuan dari eksploitasi dan prasangka. Dalam Program MAMPU, Migrant CARE aktif di 8 kabupaten, 37 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-l)
8. 'Aisyiyah: Didirikan tahun 1917, 'Aisyiyah organisasi dibawah Muhammadiyah yang berfokus pada sekumpulan perempuan yang otonom, dan berpartisipasi pada pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kontribusi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi. Dalam Program MAMPU, 'Aisyiyah aktif di 6 provinsi, 15 kabupaten, 100 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-a).
9. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP): Didirikan tahun 2001, fokus untuk memastikan bahwa penelitian dan upaya advokasi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan didasarkan pada fakta. Dalam Program MAMPU, YKP aktif di 15 kabupaten (MAMPU, n.d.-q)

10. Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU): Didirikan tahun 2012, dengan fokus pada tokoh strategis yang menghalangi pemenuhan hak-hak perempuan terhadap akses informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan gizi. Adapun tokoh-tokoh strategis tersebut yaitu pemuka agama dan budaya, tenaga kesehatan, sekolah dan pemerintah daerah. Salah satu targetnya adalah untuk mengubah norma budaya yang mencegah perempuan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan gizi. Dalam Program MAMPU, PERMAMPU aktif di 8 provinsi, 34 kabupaten, 224 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-f)
11. Forum Pengada Layanan (FPL): Memiliki jangkauan lebih dari 112 organisasi di hampir seluruh provinsi Indonesia, sehingga dapat melayani perempuan yang telah dilecehkan, termasuk manajemen kasus, rujukan, bantuan hukum, dan pusat krisis. Dalam Program MAMPU, FPL aktif di 15 provinsi, 31 kabupaten, 102 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-b).
12. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan): Didirikan tahun 1998, sebagai lembaga independen memiliki tugas untuk memberikan perlindungan bagi perempuan termasuk tindak kekerasan, kesadaran publik, pendataan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, kajian kebijakan, dan memperluas jangkauan tugasnya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan adalah beberapa cara untuk mewujudkannya. KOMNAS Perempuan mendirikan FPL (Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (MAMPU, n.d.-e).

13. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI):

Didirikan tahun 2009, berfokus pada menggabungkan dan menyebarkan program bantuan untuk Indonesia Timur. BaKTI merupakan salah satu yang mengadopsi Program MAMPU untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan. Cara yang digunakan adalah dengan mengedepankan kerja sama di lima provinsi, tujuh kabupaten, dan 85 desa/kelurahan (MAMPU, n.d.-k).



